

**ANALISIS DAMPAK UTANG PEMERINTAH TERHADAP KONSUMSI
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF *RICARDIAN EQUIVALENCE*
HYPOTHESIS DI INDONESIA TAHUN 2000-2022**

(Skripsi)

Oleh :

Nama : Fadli Ariski
NPM : 2011021023
Konsentrasi : Ekonomi Publik dan Fiskal
Dosen Pembimbing : Moneyzar Usman, S.E., M.Si.



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS DAMPAK UTANG PEMERINTAH TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF *RICARDIAN EQUIVALENCE* *HYPOTHESIS* DI INDONESIA TAHUN 2000-2022

Oleh

FADLI ARISKI

Ricardian Equivalence Hypothesis (REH) merupakan salah satu studi yang mempelajari bagaimana dampak utang pemerintah terhadap perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak utang pemerintah terhadap konsumsi masyarakat Indonesia dalam perspektif Ricardian Equivalence Hypothesis selama periode 2000-2022. Penelitian ini menggunakan variabel konsumsi masyarakat, utang pemerintah, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, dan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Vector Error Correction Model (VECM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang pemerintah dalam jangka panjang maupun jangka pendek memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi masyarakat Indonesia, yang menolak *Ricardian Equivalence Hypothesis*. Pengeluaran pemerintah juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, penerimaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap konsumsi masyarakat dalam jangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika kebijakan fiskal di Indonesia dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Ricardian Equivalence Hypothesis*, Utang Pemerintah, Konsumsi Masyarakat, Pengeluaran Pemerintah, Penerimaan Pajak, *Vector Error Correction Model*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPACT OF GOVERNMENT DEBT ON HOUSEHOLD CONSUMPTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE RICARDIAN EQUIVALENCE HYPOTHESIS IN INDONESIA (2000-2022)

By

FADLI ARISKI

The Ricardian Equivalence Hypothesis (REH) is a study that examines the impact of government debt on the economy. This research aims to analyze the impact of government debt on Indonesian household consumption from the perspective of the Ricardian Equivalence Hypothesis during the period 2000-2022. This study uses variables such as household consumption, government debt, government expenditure, and tax revenue. The method used in this research is the Vector Error Correction Model (VECM). The results indicate that government debt, both in the long and short term, has a significant impact on household consumption in Indonesia, thereby rejecting the Ricardian Equivalence Hypothesis. Government expenditure also has a significant positive impact on household consumption in Indonesia, both in the short and long term. However, tax revenue has a negative impact on household consumption in the long term. This study contributes to the understanding of the dynamics of fiscal policy in Indonesia and its implications for public welfare.

Keywords: *Ricardian Equivalence Hypothesis, Government Debt, Household Consumption, Government Expenditure, Tax Revenue, Vector Error Correction Model*

**ANALISIS DAMPAK UTANG PEMERINTAH TERHADAP KONSUMSI
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF *RICARDIAN EQUIVALENCE*
HYPOTHESIS DI INDONESIA TAHUN 2000-2022**

Oleh

FADLI ARISKI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK UTANG PEMERINTAH
TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF *RICARDIAN EQUIVALENCE*
HYPOTHESIS DI INDONESIA TAHUN 2000-2022**

Nama Mahasiswa : **Fadli Ariski**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2011021023

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.Si.
NIP 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

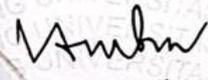
Ketua

: **Moneyzar Usman, S.E., M.Si,**



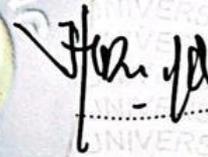
Penguji 1

: **Prof. Ambya, S.E., M.Si,**



Penguji 2

: **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si,**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si,

NIP 19660621190031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Juli 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadli Ariski

NPM : 2011021023

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Analisis Dampak Utang Pemerintah Terhadap Konsumsi Masyarakat dalam Perspektif Ricardian Equivalence Hypothesis di Indonesia Tahun 2000-2022” adalah hasil karya saya sendiri, dan dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan dari orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat pemikiran dari peneliti lain tanpa pengakuan peneliti aslinya. Apabila terdapat hall tersebut diatas, baik disengaja ataupun tidak, sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 11 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Fadli Ariski

NPM. 2011021023

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fadli Ariski yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2001 di Dusun Gaya Indah. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Paidi dan Ibu Tumini. Penulis mengawali pendidikan di Taman kanak-kanak di TK Ceria Ananda, Kecamatan Candipuro kabupaten Lampung Selatan Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 01 Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Pada jenjang selanjutnya, penulis menempuh pendidikannya di SMP Budi Utomo, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Mhammadiyah 01 Way Sulan dan selesai tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama kuliah, penulis ikut serta dalam berorganisasi di tingkat fakultas. Penulis ikut sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA). Pada tahun 2022, penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Mujadalah: 11)

"Setiap orang pernah jatuh. Tetapi cara kita bangkit kembali yang membuat kita menjadi siapa kita."

(The Dark Knight)

“Dimana ada kemauan, disitu ada jalan”

” (Fadli Ariski)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alaamiin

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan, ku persembahkan skripsi ini kepada: Diriku yang begitu hebat bisa sampai di titik ini.

Terkhusus untuk orang tuaku yang sangatku cintai dan sayangi, Bapak Paidi, dan Ibu Tumini, serta adikku Ilham Miftahul Huda & Arinda Putri Shakila yang tak pernah lelah memberi dukungan baik dukungan moril maupun materil. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah menjadi penyemangat dalam mewujudkan cita-cita dan menyelesaikan studi hingga akhir.

Teruntuk keluarga, sahabat, dan teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas dukungan serta do'a yang terus mengalir hingga mampu menyelesaikan skripsi ini, tanpa dukungan kalian penulis tidak akan kuat sampai di titik ini.

Teruntuk Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.

Dan tak lupa almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Semoga apapun yang kalian berikan dan do'akan akan berbalik pada kalian pula.

Segala ketulusan dan keikhlasan kalian dibalas oleh Allah SWT, Aamiin...

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alaamiin, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan. Skripsi ini berjudul "Analisis Dampak Utang Pemerintah Terhadap Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ricardian Equivalence Hypothesis Di Indonesia Tahun 2000-2022

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan penuh kasih dan sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.
3. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Ambya, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen penguji skripsi yang telah membimbing dan memberi arahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran, motivasi dan nasihat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran, motivasi dan nasihat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu dan pelajaran selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staf/Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

9. Terkhusus dan tersayang Bapakku Paidi dan Ibuku Tumini, terima kasih atas cinta dan kasih, dukungan, motivasi, serta do'a yang tiada henti. Ibuku tercinta, terimakasih sudah menjadi sosok yang begitu hebat dan menjadi sosok yang paling mengerti. Sosok yang selalu menjadi acuan semangat untuk diriku menyelesaikan skripsi ini.
10. Adikku Ilham Miftahul Huda & Arinda Putri Shakila tercinta yang memberikan semangat, dan menjadi penyemangat agar menjadi yang terbaik dan membanggakan untuk keluarga.
11. Keluarga besarku tersayang, terimakasih atas segala nasihat, kebaikan, motivasi, serta do'a dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
12. Teman-Temanku Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2020 Ilham, Erid, Galang dan semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan, Terimakasih telah menerima semua kekuranganku dan segala kebaikan, waktu, kasih sayang, masukan, dan do'a yang tiada henti memberikan semangat untukku.
13. Teman-Temanku Santri PPM Baitusshodiq yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terimakasih telah menerima semua kekuranganku dan segala kebaikan, waktu, kasih sayang, masukan, dan do'a yang tiada henti memberikan semangat untukku.
14. Teman-teman KKN Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih telah berbagi suka dan duka serta berbagi pengalaman selama KKN.
15. Seluruh mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Keluarga Cemara Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan telah menjadi teman-teman yang terbaik selama ini. Semoga pertemanan dan silaturahmi kita tetap terjaga.
16. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Dan terkhusus untuk diriku sendiri, Terimakasih sudah bertahan sampai detik ini banyak sekali cobaan maupun hambatan semoga kedepannya menjadi diri yang bisa bermanfaat bagi semua orang.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan do'a yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Juni 2024

Penulis

Fadli Ariski

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kajian Teoritis	12
2.1.1 <i>Ricardian Equivalence Hypothesis</i>	12
2.1.3 Teori <i>Keynesian</i>	14
2.1.2 Pengertian Konsumsi	16
2.1.4 Kebijakan Fiskal.....	17
1.1.8 Utang Pemerintah.....	18
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah.....	21
2.1.6 Penerimaan Pajak	23
2.2 Kajian Empiris.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran	29
2.4 Hipotesis	31
III. METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Metode Penelitian.....	32
3.1.1 Jenis dan Sumber Data	32
3.1.2 Definisi Operasional Variabel.....	33
3.3 Teknik Analisis Data	33

3.3.1	Tahapan Analisis	34
3.3.2	Uji Stasioneritas Data.....	36
3.3.3	Uji Kointegrasi Data	37
3.3.4	Estimasi <i>VAR</i> atau <i>VECM</i>	37
3.3.5	Analisis <i>VAR</i> atau <i>VECM</i>	38
3.3.6	Analisis Impulse Response.....	38
3.3.7	Analisis <i>Variance Decomposition</i>	38
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1	Hasil dan Analisis Data	40
4.1.1	Data Penelitian	71
4.1.2	Uji Stationer Menggunakan <i>Unit Root Test</i>	41
4.1.3	Penentuan Lag Optimum.....	41
4.1.4	Uji Stabilitas.....	42
4.1.5	Uji Kausalitas	43
4.1.6	Uji Kointegrasi	44
4.1.7	Model <i>VECM</i>	45
4.1.8	<i>Impulse Responses</i>	47
4.1.9	<i>Variance Decomposition (VD)</i>	48
4.2	Pembahasan	49
4.2.1	Pengaruh utang pemerintah terhadap konsumsi masyarakat	51
4.2.2	Teori Ricardian equivalence hypothesis tidak berlaku di Indonesia. 55	
4.2.3	Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi masyarakat.	56
4.2.4	Pengaruh penerimaan pajak terhadap konsumsi masyarakat	59
V.	Kesimpulan dan Saran	64
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. PDB Indonesia Tahun 2000-2022 (persentase).....	2
2. Konsumsi Masyarakat Indonesia Tahun 2000-2022 (Milyar Rupiah).....	3
3. Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2000-2022 (Milyar Rupiah).....	5
4. Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2000-2022 (Milyar Rupiah).....	6
5. Utang Pemerintah Indonesia Tahun 2000-2022 (Triliun Rupiah)	8
6 Kerangka Pemikiran	30
7. Variabel, Satuan, dan Sumber Data	34
8. Proses Pembentukan <i>VAR</i> atau <i>VECM</i>	35
9. Grafik uji stationer pada tingkat <i>second difference</i>	73
10. Grafik uji stabilitas	75
11. Hasil Uji <i>Impulse Response Function (IRF)</i>	47

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil analisis statistik deskriptif.....	40
2. Hasil uji <i>unit root test</i> pada tingkat <i>second difference</i>	41
3. Hasil penentuan <i>lag</i> optimum	41
4. Hasil uji stabilitas.....	42
5. Hasil uji kointegrasi	45
6. Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	51
7. Data penelitian dalam milyar rupiah	71
8. Hasil <i>unit root test</i> pada tingkat level	71
9. Hasil <i>unit root test</i> pada tingkat <i>first difference</i>	72
10. Hasil uji <i>unit root test</i> pada tingkat <i>second difference</i>	72
11. Hasil penentuan <i>lag</i> optimum	73
12. Hasil uji stabilitas.....	74
13. Hasil uji <i>kausalitas granger</i>	75
14. Hasil uji kointegrasi	76
15. Hasil model <i>VECM</i>	76
16. Hasil uji <i>variance decomposition</i>	79

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan semangat tiada henti. Terima kasih atas pengorbanan, cinta, dan kesabaran kalian dalam membimbing serta mendukung langkah-langkahku hingga mencapai titik ini. Tanpa kalian, saya tidak akan sampai sejauh ini.
2. Pembimbing skripsi saya, Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan ilmu yang telah diberikan.
3. Pembimbing akademik saya Prof. Ambya., S.E., M.Si. yang selalu memberikan motivasi dan arahan selama masa studi saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih atas semua nasihat dan bimbingannya.
4. Teman-teman seperjuangan, EP 2020, Santri PPMBS, Terkhusus member Usman dan semua teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan dukungannya. Kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini.
5. Seluruh keluarga besar Mbah Jiem, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam setiap langkah yang saya ambil.
6. Dosen dan staf Fakultas ekonomi dan bisnis, yang telah memberikan ilmu, dukungan, dan bimbingan selama masa studi saya.
7. Almamater tercinta Universitas Lampung, tempat saya menimba ilmu dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

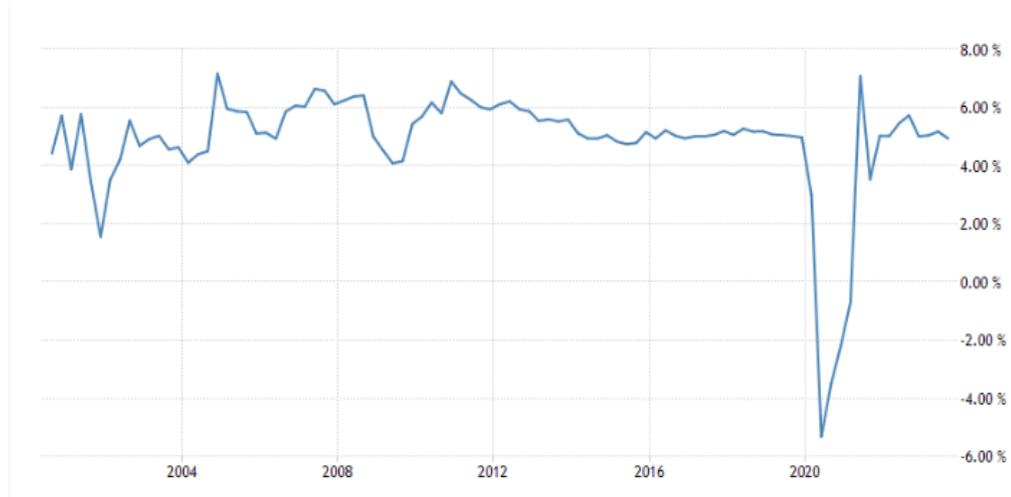
Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja yang membacanya.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia belakangan ini tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi yang diiringi dengan peningkatan produksi produk dan jasa dalam masyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2010). Pemerintah mempunyai alat berupa kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan kondisi perekonomian suatu negara, semua inisiatif pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan PDB negara tersebut. Setiap kebijakan mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang. Untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah menggunakan alat-alatnya untuk melakukan kegiatan produktif. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih berkelanjutan dengan memberikan bobot yang sama pada kepentingan generasi sekarang dan masa depan.

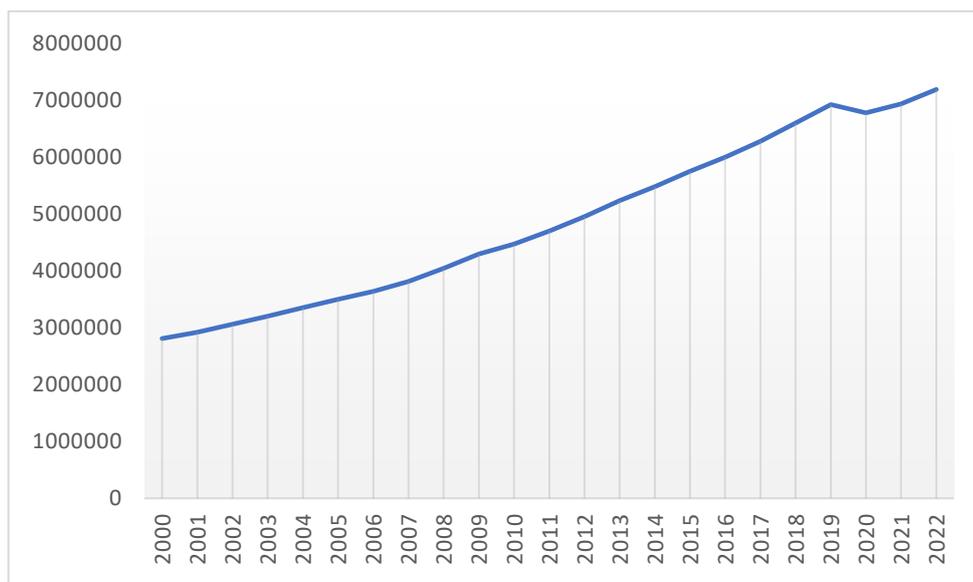
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,02% pada tahun 2019, namun sebesar -2,07% pada tahun 2020. Perekonomian Indonesia meningkat sebesar 5,17% setiap tahunnya pada triwulan II tahun 2023. Namun dibandingkan triwulan sebelumnya, perekonomian Indonesia Pertumbuhan ekonomi sedikit menurun menjadi 4,94% pada triwulan III tahun 2023. Banyak penyebab yang menyebabkan penurunan tersebut, salah satunya adalah menurunnya konsumsi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dalam kebijakan fiskal sangat penting untuk memitigasi dampak kemerosotan ekonomi akibat pandemi ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) diakses pada 2023 (diolah)

Gambar 1. PDB Indonesia Tahun 2000-2022 (persentase)

Intinya, faktor yang paling signifikan dalam pelaporan pendapatan nasional adalah penggunaan PDB (Produk Domestik Bruto) (Case, 2007). PDB menjadi landasan penentuan jumlah uang yang diterima masyarakat dan sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara teoritis, pendapatan sendiri mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat karena meningkatkan jumlah barang yang dapat dikonsumsi. Oleh karena itu, konsumsi dan pendapatan berbanding lurus. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seseorang akan membagi uangnya untuk menutupi pengeluarannya. Dalam hidupnya, seseorang memenuhi kebutuhan dan keinginan. Selain makanan, masyarakat juga membutuhkan barang-barang non-makanan untuk keperluan belanja dan rekreasi (mobil, pakaian, sepatu, tas, perhiasan, dan lain-lain). Berikut penjelasan perkembangan konsumsi masyarakat di Indonesia antara tahun 2000 dan 2022:



Sumber: World Bank diakses pada 2023 (diolah)

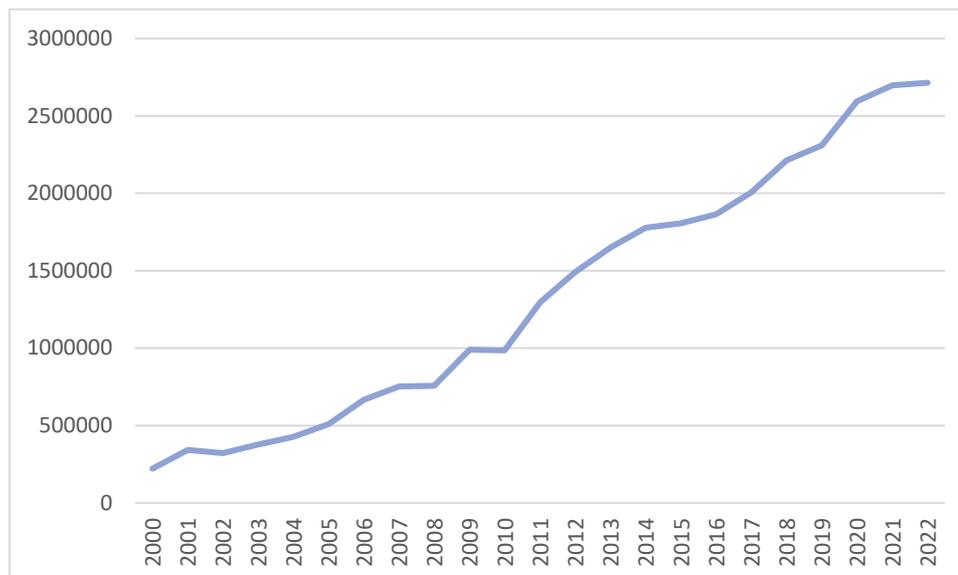
Gambar 2. Konsumsi Masyarakat Indonesia Tahun 2000-2022 (Milyar Rupiah)

Antara tahun 2000 dan 2019, terjadi peningkatan konsumsi barang dan jasa masyarakat Indonesia. Konsumsi masyarakat mencapai 2.812.806 miliar Rupiah pada tahun 2000 dan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan konsumsi yang mencapai 6.928.389 miliar rupiah pada tahun 2019, terjadi puncak pertumbuhan. Kemudian terjadi variasi pada tahun 2020 mencapai 6.784.675 miliar rupiah. Ketika suatu negara menghadapi bencana, seperti wabah Covid-19, konsumsi masyarakat bisa saja berubah. Perekonomian biasanya akan melambat akibat menurunnya nilai konsumsi masyarakat karena menghambat aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, agar perekonomian Indonesia tetap stabil meski terjadi krisis atau wabah penyakit, pemerintah harus membantu menyelesaikannya.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menghidupkan kembali perekonomian Indonesia yang sedang lesu. Langkah yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan kebijakan fiskal yang terarah. Pemerintah dapat memanfaatkan instrumen kebijakan fiskal, dalam pengaturan akan perpajakan ataupun dalam mengatur pengeluaran dari pemerintah. Kebijakan terkait pengeluaran pemerintah menjadi kunci penting karena jika dikelola dengan baik, hal ini dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah disasarkan untuk aktivitas produktif guna memberikan pengaruhnya

yang positif juga besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebabnya, perlu strategi yang matang dari pemerintah dalam menentukan alokasi pengeluaran agar dapat memberikan dorongan signifikan terhadap sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara efektif.

Di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan jendela kebijakan fiskal. Kebijakan belanja pemerintah merupakan salah satu alat kebijakan fiskal yang terdapat dalam APBN. Dampak jangka panjang dan pendek dari keputusan belanja pemerintah terhadap distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi juga diamati. Belanja sosial, misalnya, meningkatkan akses terhadap layanan publik yang penting dan menjamin pendapatan dasar. Sektor barang dan jasa untuk konsumsi masyarakat juga terkena dampak belanja pemerintah. Pendapatan merupakan faktor utama yang menentukan seberapa besar konsumsi masyarakat. Investasi pemerintah dalam bantuan tunai secara langsung menurunkan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dalam jangka pendek. Dalam rangka pemulihan ekonomi negara, pemerintah dapat mendorong konsumsi masyarakat. Berdasarkan data APBN, belanja pemerintah terus meningkat antara tahun 2000 hingga tahun 2022. Belanja pemerintah sampai dengan tahun 2022 sebesar 2.714.155,72 miliar rupiah.

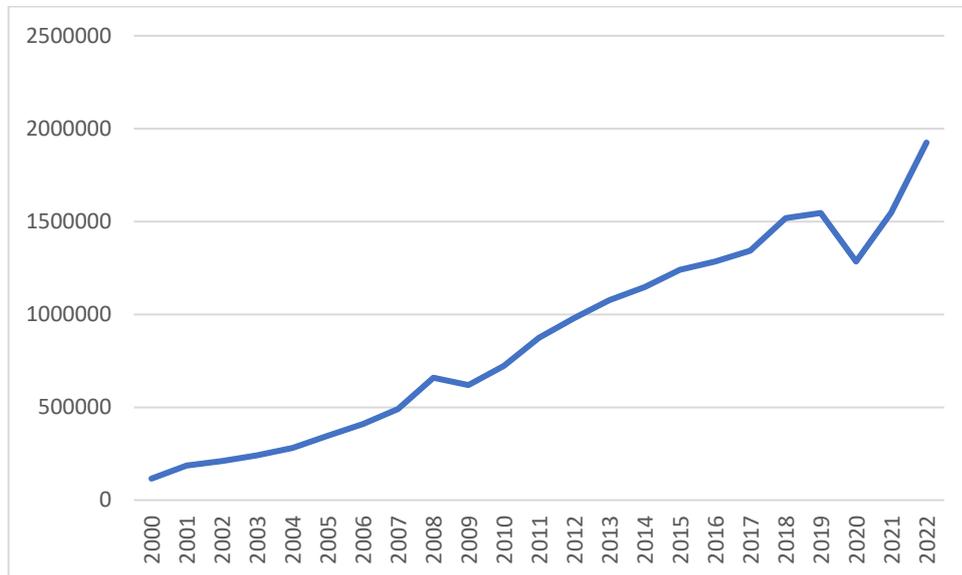


Sumber: Kementerian Keuangan RI diakses pada 2023 (diolah)

Gambar 3. Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2000-2022 (Milyar Rupiah)

Permintaan terhadap aliran pendapatan meningkat sebagai respons terhadap kebutuhan belanja pemerintah yang terus meningkat. Salah satu penerimaan pemerintah adalah penerimaan dari sumber pajak. Salah satu alat kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan uang adalah perpajakan. Pemerintah Indonesia memungut berbagai pajak, termasuk pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan pajak bumi dan bangunan. Pajak atas penghasilan, baik dari pekerjaan, bisnis, atau investasi, dikenal sebagai pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan atas penjualan produk dan jasa dikenal sebagai pajak pertambahan nilai. Sebaliknya kepemilikan tanah dan bangunan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan pajak merupakan salah satu aspek yang bisa mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, karena ketika masyarakat dikenakan pajak yang lebih tinggi maka akan berdampak terhadap penurunan pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung untuk mengurangi konsumsi terhadap barang atau jasa. Sebaliknya, kenaikan konsumsi masyarakat yang lebih tinggi terjadi ketika pajak atas produk konsumsi diturunkan (Arjuna, 2021). Penelitian (Meissner & Rostam-Afschar, 2017) menemukan aspek pajak terhadap siklus konsumsi, menunjukkan perubahan dalam perpajakan memiliki efek rata-rata yang signifikan dan kuat pada konsumsi, hasilnya berbeda dari studi (Istiasih, 2022) di

Indonesia yang menyatakan pajak tak ada pengaruhnya pada konsumsi masyarakat di Indonesia.



Sumber: Kementerian Keuangan RI diakses pada 2023 (diolah)

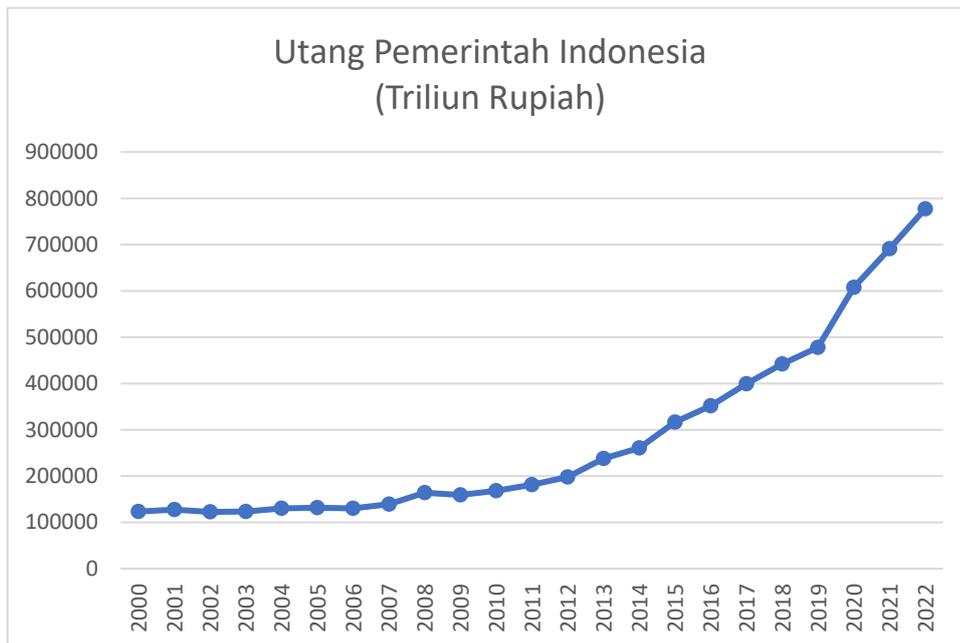
Gambar 4. Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2000-2022 (Milyar Rupiah)

Kebijakan defisit anggaran merupakan satu alat kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia saat ini. Kebijakan defisit anggaran pemerintah adalah kebijakan fiskal yang menetapkan pengeluaran negara lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya. Kebijakan defisit anggaran pemerintah menunjukkan bahwa penerimaan pajak lebih kecil dari pengeluaran, atau dengan kata lain, penerimaan pajak tidak cukup untuk menutupi kebutuhan belanja pemerintah. Penerimaan pajak pada tahun 2022 sebesar 1.924.937,50 miliar rupiah, lebih kecil dari kebutuhan belanja pemerintah sebesar 2.714.155,72 miliar rupiah. Oleh karena itu, untuk menutup defisit anggaran pada tahun yang bersangkutan, pemerintah perlu memperoleh pendanaan baik dari sumber lokal maupun internasional. Mengambil hutang atau pinjaman dari pemerintah adalah salah satu metode yang mungkin digunakan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.

Karena digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan rutin dan signifikan, utang pemerintah merupakan alat yang sangat berguna untuk mencoba

menutup kesenjangan antara anggaran pendapatan dan belanja negara (Atmadja, 2004). Jumlah utang pemerintah merupakan sumber pendanaan pemerintah yang konsisten dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Peran utang pemerintah menjadi perhatian utama dalam kebijakan fiskal suatu negara. pertumbuhan ekonomi di Indonesia seringkali didukung oleh penggunaan utang pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi. Di sisi lain, utang pemerintah lama kelamaan dapat menimbulkan sejumlah masalah perekonomian. Keynes percaya bahwa kebijakan fiskal, dalam bentuk utang, secara teoritis dapat memacu ekspansi ekonomi. Karena seluruh dana disalurkan sesuai dengan kebutuhan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, strategi ini mempunyai efek pengganda (multiplier effect) yang meningkatkan permintaan agregat.

Namun, dari perspektif Neo-Klasik, defisit anggaran yang dibiayai pinjaman yang mendanai belanja konsumen akan berdampak negatif jangka panjang terhadap perekonomian dan distribusi pendapatan generasi. Pajak yang tinggi untuk menutupi utang dan bunga yang harus dibayar generasi mendatang menjadi biang keladinya. Data utang pemerintah Indonesia dari tahun 2000 hingga 2022 menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Jumlah utang tercatat pada angka 123.428 triliun rupiah tahun 2000 dan semakin meningkat sampai 777.325 triliun rupiah tahun 2022. Ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam tingkat utang pemerintah selama periode tersebut.



Sumber: Kementerian Keuangan RI diakses pada 2023 (diolah)

Gambar 5. Utang Pemerintah Indonesia Tahun 2000-2022 (Triliun Rupiah)

Peningkatan aktivitas ekonomi dapat didorong oleh penggunaan utang untuk mendukung usaha-usaha produktif, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di sisi lain, sejak awal Orde Baru hingga saat ini, perkembangan neo-liberal telah mengakibatkan tingginya utang yang membebani masyarakat secara keseluruhan (Arif dan Sasono dan Rachbini dan Hakim, 2006). Masyarakat di masa depan akan terbebani oleh utang pemerintah yang terus bertambah. Untuk mengatasi utang yang bertambah, pemerintah mungkin akan meningkatkan pajak atau mengurangi layanan publik. Hal ini bisa membebani masyarakat dengan pengurangan akses terhadap layanan yang mereka perlukan atau peningkatan beban pajak yang harus mereka tanggung.

Ricardian Equivalence Hypothesis (REH) adalah studi yang melihat bagaimana perekonomian dipengaruhi oleh utang pemerintah. Barro (1974) mengemukakan teori ini, yang dibangun berdasarkan gagasan ekonom klasik David Ricardo, bahwa tingkat utang pemerintah saat ini akan menimbulkan beban yang lebih besar pada masyarakat di kemudian hari (Hakim, 2006). Dengan menggunakan variabel-

variabel yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat, pendekatan Ricardian mengevaluasi dampak utang pemerintah terhadap perekonomian menggunakan penalaran konsumen. Konsumen diyakini akan bereaksi secara rasional terhadap program pinjaman dan penghapusan utang yang dilaksanakan pemerintah. Pelanggan menyadari bahwa kenaikan pajak di masa depan merupakan konsekuensi langsung dari strategi fiskal ekspansif pemerintah, yang mengakibatkan peningkatan utang. Akibatnya, pelanggan yang bijaksana akan mempertahankan peningkatan pendapatan setelah pajak mereka daripada membelanjakannya untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi tanggung jawab pajak mereka di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan utang pemerintah tidak boleh mendorong konsumen untuk membelanjakan lebih banyak uang (Mankiw, 2008). Akibatnya, ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan pajak di masa depan dapat menetralkan efek stimulus belanja pemerintah. Meskipun demikian, karena kontradiksinya dengan teori Keynesian, gagasan ini terus menjadi kontroversi di kalangan para ahli. Menurut teori Keynesian, besarnya uang yang dikeluarkan pemerintah dapat mempengaruhi seberapa besar konsumsi konsumen.

Ricardian Equivalence Hypothesis (REH) didukung oleh berbagai penelitian yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi masyarakat dan utang pemerintah. Contohnya adalah penelitian (Oukhallou, 2016) di Maroko, dan (Ayunasta et al., 2020) di Indonesia setelah krisis global tahun 2008. (Hadiwibowo, 2008) mereka mempelajari *Ricardian Equivalency Hypothesis* (REH) di Indonesia; temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, seperti yang dinyatakan dalam pajak dan utang pemerintah atau instrumen belanja, tidak mempunyai dampak langsung terhadap konsumsi masyarakat. Namun penerapan Hipotesis Ricardian menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat mendukung pernyataan Keynes mengenai dampak kebijakan pemerintah, khususnya dalam jangka pendek. Berdasarkan penelitian Hadiwibowo, masyarakat menyikapi program pemerintah dengan proses berpikir rasional, bukan dengan mengubah pola pembeliannya.

Hasil dari beberapa penelitian lain memberikan bukti yang menentang Hipotesis Kesetaraan Ricardian dan mendukung perspektif Keynesian. Hasil penelitian yang tidak mendukung *Ricardian Equivalence Hypothesis* antara lain (Prasetya et al., 2022) yang menemukan bahwa teori ini tidak berlaku di ASEAN tahun 2009-2020 serta penelitian lain seperti (Tharindu & Silva, 2023.) yang menemukan adanya pengaruh utang milik pemerintah pada konsumsi masyarakat di negara srilanka. (Marinheiro, 2001) pun menganalisis *Hypotesis Ricardian Equivalence* memanfaatkan faktor kekayaan, pendapatan, dan kebijakan fiskal sebagai variabel independen dan konsumsi masyarakat sebagai variabel dependen. Penerapan REH pada perekonomian Portugal ditolak oleh temuan penelitian tersebut. Selain itu, penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Belingher dan Moroianu menunjukkan bahwa perekonomian Rumania tidak tercakup dalam *Ricardian Equivalence Hypothesis*.

Penulis tertarik untuk melakukan kajian skripsi mengenai analisis teori Ricardian Equivalence mengenai kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia, berdasarkan perbedaan pendapat yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel digunakan pada studi mencakup konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak dan utang pemerintah. Penelitian ini akan menganalisis dampak pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak dan utang pemerintah terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2022. Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang menambah daya tarik untuk mengkaji tingkat konsumsi yang cenderung tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Terjadi perbedaan antara realita dan teori *ricardian equivalence hypothesis* ini. dalam hasil penelitian yang berkaitan dengan validitas *Ricardian Equivalence Hypothesis*. Beberapa penelitian di Indonesia memberikan informasi dimana utang pemerintah tidak ada pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat (Mosikari & Eita, 2017). Namun, penelitian lain menolak pandangan tersebut dan menyatakan bahwa utang pemerintah mempengaruhi konsumsi masyarakat (Ayyubi & Saputra,

2021). Mengingat adanya disparitas pada temuan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi kembali bagaimana konsumsi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh utang pemerintah. Selain menguji kelayakan teori *Ricardian Equivalency*, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, dan tingkat utang mempengaruhi konsumsi masyarakat Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya studi ini adalah:

1. Guna mengetahui apakah utang pemerintah berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia.
2. Guna mengetahui apakah teori *Ricardian Equivalence hypothesis* berlaku di Indonesia.
3. Guna mengetahui apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia.
4. Guna mengetahui apakah penerimaan pajak berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan definisi masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Diharapkan dapat membantu memajukan pengetahuan di bidang perekonomian masyarakat, khususnya di bidang yang berkaitan dengan dampak perpajakan, pengeluaran pemerintah, dan utang terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia.
2. Secara Praktis, Diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, atau pihak terkait untuk memahami bagaimana pendapatan pajak, belanja pemerintah, dan utang mempengaruhi konsumsi masyarakat di Indonesia. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi para pelaku dan pelaku ekonomi dalam memajukan perekonomian, sehingga memberikan pilihan lain dalam memilih atau memutuskan suatu kebijakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 *Ricardian Equivalence Hypothesis*

Studi terkait *Ricardian Equivalence Hypothesis* dikemukakan pertama kalinya oleh (Barro, 1974). Barro menegaskan bahwa perspektif Ricardian menyatakan bahwa konsumen membuat keputusan mengenai pengeluaran mereka dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan mereka serta pendapatan mereka saat ini. Utang yang dimiliki pemerintah pada dasarnya sama dengan pajak di masa depan. Artinya, jika pelanggan melihat ke masa depan, pajak di masa depan akan sama dengan pajak di masa kini; dengan kata lain, pajak akan sama dengan dana pemerintah yang diperoleh melalui hutang. Sehingga seharusnya pemotongan dari pajak tidak akan menyebabkan konsumen meningkatkan pengeluarannya. Pemotongan pajak saat ini akan menyebabkan konsumen menabung untuk membiayai kewajiban akan pajak di kemudian hari.

Setelah Barro meneliti perspektif *Ricardian Equivalence*, studi lanjutan dilakukan oleh (Kormendi, 1983) kemudian disempurnakan (Kormendi dan Meguire 1990) disebut sebagai strategi konsolidasi. Metode Keynesian tradisional, yang menyatakan bahwa konsumsi adalah fungsi dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, diperbaiki dengan pendekatan konsolidasi. Sementara pendekatan konsolidasi menggunakan fungsi konsumsi. Pandangan *Ricardian Equivalence* (RE) mengatakan dimana hutang milik pemerintah tak memiliki pengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Pelanggan/konsumen memahami bahwa konsumsi saat ini tidak hanya bergantung pada pendapatannya saja, namun terdapat pengaruh variabel lain yaitu utang dan pengeluaran pemerintah. Menurut (Hakim, 2006)

pengaruhnya dari utang luar negeri pada konsumsi masyarakat ini menjadi fokus dari *Ricardian Equivalence Hypothesis* yaitu utang pemerintah sekarang dapat menimbulkan naiknya pajak di masa yang akan datang. Menurut (Mankiw, 2008) Menurut perspektif Ricardian ini, konsumen membuat keputusan mengenai pengeluaran mereka dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan mereka dan bukan hanya pendapatan yang akan mereka terima saat ini. Utang yang dimiliki pemerintah pada dasarnya sama dengan pajak di masa depan. Artinya, jika pelanggan melihat ke masa depan, pajak di masa depan akan sama dengan pajak di masa kini; dengan kata lain, pajak akan sama dengan dana pemerintah yang diperoleh melalui utang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, 2006) menyatakan bahwa langkah pertama untuk memahami hubungan antara utang publik dan perpajakan di masa depan adalah dengan memvisualisasikan perekonomian yang terbagi menjadi dua periode waktu. Masa kini dilambangkan dengan periode pertama, dan masa depan dilambangkan dengan periode kedua. Pemerintah memungut pajak (T_1) dan menggunakan uangnya pada periode kedua (G_2), dan membelanjakannya (T_2) pada periode pertama. Defisit anggaran (D) pada tahap pertama sama dengan pengeluaran pemerintah dikurangi pajak. Penjualan obligasi digunakan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran.

$$D = G_1 - T_1 \quad (1)$$

Untuk melunasi utang dan menutupi biaya bunga (r), pemerintah harus memungut pajak pada periode kedua dari:

$$T_2 = (1 + r) D + G_2 \quad (2)$$

Substitusikan persamaan diatas menjadi:

$$T_2 = (1 + r)(G_1 - T_1) + G_2 \quad (3)$$

Persamaan sebelumnya (3) menghubungkan pembayaran pajak selama dua periode waktu. Persamaan di atas dapat diubah menjadi: untuk memudahkan penafsiran.

$$T_2 = G_2$$

$$T_{1+1} = G_1 + 1+r \quad (4)$$

Keterbatasan keuangan pemerintah diwakili oleh persamaan ini. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan nilai pajak saat ini. Kita dapat menerapkan teknik substitusi antarwaktu untuk menjelaskan kejadian ini. Pada periode pertama, pemerintah menerbitkan obligasi dan menurunkan tarif pajak sebesar ΔT . Untuk melunasi utang dan bunga yang masih harus dibayar, pemerintah harus menaikkan pajak sebesar $(1 + r) \Delta T$ pada periode kedua. Namun peralihan dari titik A ke titik B tidak mengubah apa pun karena keterbatasan anggaran dan nilai kini pendapatan tetap tidak berubah. Dengan kata lain, pemotongan pajak mempunyai pengaruh yang kecil terhadap konsumsi masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3 Teori Keynesian

Aliran pemikiran Keynesian berpendapat bahwa tidak semua pasar berada dalam keseimbangan, bahwa perilaku ekonomi mempunyai perspektif jangka pendek, dan terdapat hubungan yang longgar antar generasi. Pasar tenaga kerja tidak seimbang, dan pengangguran merupakan hal yang konstan dalam perekonomian. Penganut Keynesian berpendapat bahwa defisit anggaran pemerintah yang dibiayai oleh utang luar negeri akan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan, dan peningkatan pendapatan akan menyebabkan peningkatan konsumsi. Karena beban pajak saat ini yang relatif lebih rendah karena defisit anggaran pemerintah yang didukung oleh utang luar negeri, maka pendapatan diskresi akan meningkat. Permintaan secara keseluruhan akan meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi ketika pendapatan yang dapat dibelanjakan meningkat. Peningkatan pada sisi permintaan akan memacu peningkatan produksi, sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional jika perekonomian belum berada pada kondisi lapangan kerja penuh. Efek multiplier Keynesian akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional. Defisit anggaran pemerintah meningkatkan tingkat pendapatan dan konsumsi pada saat yang sama, yang pada saat yang sama juga meningkatkan tingkat tabungan dan akumulasi modal. Oleh karena itu, kelompok Keynesian berpendapat bahwa dalam

jangka pendek, pertumbuhan ekonomi akan dihasilkan dari kebijakan defisit anggaran dan penyelesaiannya melalui utang luar negeri pemerintah.

Mengingat pemerintah menggunakan kebijakan defisit APBN sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, maka penelitian ini mengacu pada prinsip teori Keynesian.

Mankiw (2009) mengungkapkan Model makroekonomi yang dikenal sebagai $Y = C + I + G + X - M$ diciptakan oleh teori pertumbuhan Keynes. Dalam model ini, Y berarti pertumbuhan ekonomi, C berarti konsumsi, I berarti investasi, dan G berarti pengeluaran pemerintah. Kebijakan pemerintah akan menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat sehingga akan meningkatkan PDB (produk domestik bruto). Pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan meningkatnya PDB. Utang luar negeri pemerintah tidak ada hubungannya dengan tabungan atau akumulasi modal, menurut pendekatan kesetaraan *Ricardian*. Pelanggan yang menggunakan strategi ini menyadari bahwa pengeluaran dan utang pemerintah merupakan dua faktor lain yang mempengaruhi konsumsi selain pendapatan saat ini. *Ricardian* berfokus pada bagaimana konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh utang pemerintah luar negeri. Prinsip mendasar dari teori ini adalah bahwa peningkatan pajak publik di masa depan akan disebabkan oleh tingkat utang pemerintah yang ada. Menurut analisis *Ricardian*, pajak di masa depan akan sama atau sebanding dengan pemerintahan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa utang yang terakumulasi pada saat ini sama dengan pajak yang akan dibayar di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, pemotongan pajak untuk membiayai utang tidak akan berdampak apa-apa karena masyarakat akan menghemat uang ekstra yang mungkin digunakan saat ini atau digunakan untuk menutupi kewajiban pajak di masa depan. Pemotongan pajak tidak akan mempengaruhi konsumsi masyarakat jika tabungan swasta meningkat karena tabungan pemerintah akan berkurang, dengan asumsi tabungan dalam negeri sama dengan total tabungan pemerintah dan swasta dalam jumlah yang tetap.

2.1.2 Pengertian Konsumsi

Model regresi utama yang diduga mempengaruhi konsumsi adalah (Leiderman & Blejer, 1988), melalui regresi berganda yakni:

$$C_t = a_0 + a_1 Y_t + a_2 W_t + a_3 SSW_t + a_4 G_t + a_5 T_t + a_6 TR_t + a_7 D_t + e_t$$

Dimana :

- Y = Pendapatan Pakai
- W = Kekayaan bersih awal tahun
- SSW = Nilai manfaat sosial masa depan
- G = Pengeluaran pemerintah
- T = Pendapatan pajak
- TR = Transfer ke individu
- D = Utang umum bersih

Karena koefisien dari persamaan di atas tidak sesuai dengan ekspektasi Feldstein, ia menolak gagasan kesetaraan Ricardian untuk periode 1930 – 1977 untuk ekonomi Amerika Serikat. Namun demikian, interval kepercayaan yang digunakannya tidak teratur, sehingga hasilnya harus ditinjau dengan skeptis (Ricciuti, 2001). Modigliani et al. (1985) telah menguji ER untuk Italia, melalui fungsi berikut:

$$C_{pt} = a_0 + a_1 Y_{dt} + a_2 W_t + a_4 DEF_t + a_4 D_t + e_t$$

Dimana :

- C_p = Konsumsi pribadi
- Y_d = Penghasilan pakai
- W = Kekayaan, termasuk utang pemerintah
- DEF = Defisit pemerintah (d disesuaikan dengan inflasi)
- D = Utang bersih bank sentral dan kepemilikan asing

2.1.4 Kebijakan Fiskal

Salah satu kebijakan makroekonomi yang diatur oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan adalah kebijakan fiskal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa presiden melimpahkan wewenang kepada Menteri Keuangan yang bertugas sebagai pengelola fiskal untuk mengelola dana dan aset masyarakat. Cara lain untuk memikirkan kebijakan fiskal adalah sebagai strategi ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mencoba memperbaiki keadaan perekonomian caranya yakni melakukan perubahan pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ketika perekonomian negara stabil, mengalami kenaikan, atau bahkan mengalami penurunan, hal ini akan berpengaruh kepada konsumsi masyarakatnya dengan juga memperhatikan faktor lain misalnya seperti inflasi. Kebijakan fiskal memiliki banyak tujuan untuk memperbaiki perekonomian suatu negara, misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kestabilan harga. Untuk mewujudkan perekonomian negara yang lebih baik, pemerintah perlu melakukan pengeluaran yang lebih banyak agar proses ini tidak terhambat. Jika dilihat secara teori apabila pengeluaran pemerintah meningkat namun sumber pendapatan utama pemerintah yaitu pajak tidak mengalami peningkatan, yang akan terjadi adalah defisit anggaran pemerintah karena tidak seimbangannya antara pengeluaran-pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Fiskal Aktif (*discretionary*)

Didefinisikan sebagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan mengubah tingkat pajak atau pengeluaran pemerintah itu sendiri, dimana dalam hal ini dapat bersifat ekspansioner atau kontraksioner. Kebijakan fiskal ekspansioner kebijakan yang cara melakukannya melalui menurunkan tingkat pajak atau menambah pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan fiskal kontraksioner adalah kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansioner dimana pemerintah melakukan kebijakan dengan cara menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi dengan cara menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi sendiri

merupakan proses naiknya harga secara terus-menerus. Tingkat inflasi di setiap perekonomian di suatu negara harus selalu terjaga supaya perekonomian tidak mengalami penurunan.

2. Kebijakan Fiskal Pasif (*non-discretionary*)

Kebijakan fiskal pasif yaitu segala sesuatu yang bertujuan untuk menurunkan belanja marjinal dari pendapatan nasional. Kebijakan ini cenderung meningkatkan surplus pemerintah selama periode inflasi, dan meningkatkan defisit pemerintah selama periode resesi atau ketika produk domestik bruto menurun. Pemerintah melalui instrumen-instrumen kebijakan fiskal dapat melakukan suatu kebijakan untuk menaikkan perekonomian di negaranya. Misalnya ketika perekonomian negara lesu, pemerintah dapat menambah pengeluaran yang bertujuan untuk membangkitkan atau mendongkrak perekonomian di negaranya.

1.1.8 Utang Pemerintah

Tujuan utama pemerintah mengambil utang adalah untuk membayar defisit anggaran saat ini. Dengan begitu, diharapkan perekonomian tetap stabil. Sebagai negara berkembang, Indonesia melakukan ekspansi perekonomian dengan mengembangkan segala bidang perekonomiannya. Indonesia masih kekurangan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga agar dapat bergerak lebih cepat, pemerintah melakukan pelunasan utang. Hutang mempunyai kelebihan (dampak positif) dan kekurangan (dampak negatif).

Dampak positif dari utang adalah berlangsungnya pembangunan seperti yang direncanakan oleh pemerintah yang nantinya diharapkan dengan adanya pembangunan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempunyai stabilitas perekonomian yang baik. Namun disisi lain utang pemerintah juga memiliki dampak negatif, seperti contohnya yang pernah terjadi di Indonesia pada masa krisis tahun 1998. Saat itu, terjadi penurunan nilai rupiah yang signifikan terhadap dolar AS. Karena keadaan ini, terjadi pertumbuhan utang luar negeri. Dan akhirnya, kebijakan utang baru diberlakukan oleh pemerintah. Akibatnya, bunga

dan cicilan pokok pinjaman baru meningkat setiap tahunnya. Sehingga berdampak pada kebijakan APBN yang efektivitasnya semakin menurun.

2.1.8.1 Klasifikasi dan Jenis Utang Pemerintah

Utang pemerintah atau utang pemerintah pusat terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN), tergantung dari mana utang tersebut berasal.

1. Pinjaman

Pinjaman adalah jenis utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman ini diatur dalam perjanjian pinjam meminjam, tidak berbentuk surat berharga negara, dan memuat persyaratan pelunasan. Ada dua jenis sumber pinjaman untuk pembiayaan utang: pinjaman dalam negeri (PDN) dan pinjaman luar negeri (PLN).

a. Pinjaman Luar Negeri

Menurut PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Pinjaman Luar Negeri (PLN) adalah setiap pembiayaan utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang tunduk pada perjanjian pinjaman dan tidak dalam bentuk surat berharga negara yang memiliki persyaratan pembayaran kembali. Kreditor swasta bilateral, multilateral, dan asing dapat menjadi sumber pinjaman luar negeri (KSA). Pinjaman dari kreditor bilateral berasal dari pemerintah asing atau organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut untuk meminjamkan uang kepada pemerintah.

Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), Bank Pembangunan dan Investasi milik Negara Jerman (KfW), dan Badan Pembangunan Perancis (AFD) adalah beberapa contoh kreditor bilateral. Sebaliknya, kreditor multilateral adalah organisasi keuangan internasional yang meminjamkan uang kepada pemerintah; di antara anggotanya terdapat berbagai negara, termasuk Indonesia. Organisasi kreditor multilateral termasuk Dana Internasional Pembangunan Pertanian (IFAD), Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Kreditor Swasta Asing (KSA) adalah lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, dan lembaga

keuangan asing yang berkantor pusat di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di sana. Mereka meminjamkan uang kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan yang mereka peroleh dari Badan Penjaminan Kredit Ekspor. Pinjaman luar negeri dipisahkan menjadi dua kategori berdasarkan jenis pinjaman: pinjaman aktivitas dan pinjaman tunai/program. Untuk membiayai defisit APBN dan mengelola portofolio utang, diberikan pinjaman tunai dalam bentuk mata uang asing atau rupiah. Di sisi lain, pinjaman aktivitas adalah jenis pinjaman khusus yang digunakan untuk membiayai aktivitas tertentu, seperti energi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dll.

b. Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) adalah pinjaman yang diambil dari pemberi pinjaman dalam negeri yang berdasarkan masa berlakunya harus dikembalikan. PP Nomor 54 Tahun 2008 memuat peraturan tambahan mengenai proses yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh dan meneruskan pinjaman dalam negeri. Pemerintah bermaksud memanfaatkan pinjaman dalam negeri sebagai sumber pendanaan pengganti untuk mengatasi kekurangan APBN, meningkatkan pertumbuhan produksi industri strategis dalam negeri, dan membantu pembangunan infrastruktur.

2.1.8.2 Pengaruh utang pemerintah terhadap konsumsi masyarakat

Utang milik pemerintah yang meningkat dapat berpotensi memengaruhi konsumsi masyarakat. Jika pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk membayar bunga atau cicilan utang, ini bisa mengurangi dana yang tersedia untuk program-program sosial atau investasi publik. Pengurangan ini bisa menyebabkan pengurangan subsidi atau bantuan sosial, kemudian nantinya mengurangi kemampuan beli para masyarakat serta menghambat konsumsi mereka. Selain itu, ketika utang pemerintah mencapai tingkat yang tinggi, pemerintah mungkin cenderung memotong belanja publik atau menaikkan pajak untuk mengatasi utang, yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Pasal 1 UU 17 Tahun 2003 mendefinisikan Keuangan Negara sebagai seluruh hak dan kewajiban moneter negara, serta setiap uang atau barang yang dapat diambil alih oleh negara untuk keperluan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selain itu, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Uang kas negara digunakan untuk belanja negara, dan uang kas daerah digunakan untuk belanja daerah. Setiap pembayaran yang harus dibayar kembali dan/atau biaya-biaya yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya, dianggap sebagai pembiayaan. Pemerintah menggunakan sumber daya keuangan yang dimiliki atau dikuasainya secara akuntabel, efektif, dan efisien untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penggunaan dana dan sumber daya lainnya oleh pemerintah harus mematuhi pedoman dasar pengeluaran pemerintah (juga dikenal sebagai "meriam pengeluaran pemerintah" atau *cannons of government expenditure*).

Menurut teori makroekonomi, ada tiga komponen utama pengeluaran pemerintah:

1. Pengeluaran pemerintah untuk produk dan jasa pembiayaan;
2. Belanja pemerintah untuk gaji pegawai;
3. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer, seperti pembayaran bunga/pinjaman, pembayaran pensiun, dan pembayaran dukungan langsung kepada berbagai kelompok sosial,. (Boediono,1999).

Menurut Rostow dan Musgrave dalam N. Gregory Mankiw (2012), belanja pemerintah dialokasikan menurut tiga tahap pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- 1). tahap awal;
- 2). tahap menengah; dan
- 3). tahap lanjut.

Pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat persentase investasi pemerintah yang tinggi dibandingkan dengan keseluruhan investasi karena pemerintah

diharuskan menyediakan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya.

2.1.6.1 Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi masyarakat

Pengeluaran pemerintah bisa berpengaruh besar pada konsumsi masyarakat dalam beberapa cara:

1. **Pengeluaran Infrastruktur:** Ketika pemerintah menginvestasikan dana dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau transportasi umum, ini menciptakan lapangan kerja baru. Pendapatan yang diperoleh oleh para pekerja ini kemudian dapat dihabiskan untuk konsumsi barang dan jasa, memperkuat ekonomi lokal.
2. **Subsidi dan Bantuan:** Pemerintah juga dapat memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti subsidi bahan bakar, makanan, atau program kesehatan. Ini meningkatkan daya beli masyarakat yang mungkin sebaliknya akan menghabiskan lebih sedikit jika tidak mendapat bantuan ini.
3. **Pajak dan Pendapatan:** Pengeluaran pemerintah juga terkait dengan kebijakan pajak dan pendapatan. Jika pemerintah memotong pajak bagi kelompok pendapatan menengah ke bawah, ini dapat meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi masyarakat untuk digunakan dalam konsumsi. **Stabilitas Ekonomi:** Pengeluaran pemerintah dalam program-program yang memperkuat stabilitas ekonomi juga dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat. Misalnya, program-program penanggulangan pengangguran atau perlindungan sosial dapat memberikan rasa aman finansial bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong konsumsi.
4. **Investasi Pendidikan dan Kesehatan:** Pemerintah yang menginvestasikan dana dalam pendidikan dan layanan kesehatan juga dapat berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan keterampilan dan kualifikasi pekerja, sementara layanan kesehatan yang terjangkau dapat mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat.
5. **Teori Multiplier,** yang pertama kali dikembangkan oleh John Maynard Keynes, menjadi landasan penting dalam pemahaman efek pengeluaran agregat terhadap aktivitas ekonomi. Teori ini memberikan gambaran tentang

bagaimana perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau investasi swasta dapat memiliki efek berlipat ganda pada output dan pendapatan nasional. Teori Multiplier bekerja dengan prinsip bahwa suatu peningkatan dalam pengeluaran akan merangsang konsumsi dan produksi tambahan, yang pada gilirannya menciptakan pendapatan tambahan. Peningkatan pendapatan tersebut akan kembali merangsang konsumsi, membentuk suatu siklus positif. Dalam konteks ini, setiap unit peningkatan pengeluaran dapat menciptakan efek yang lebih besar daripada jumlah awalnya.

Dalam keseluruhan, pengeluaran pemerintah bisa menjadi faktor penting yang mempengaruhi konsumsi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara yang berbeda-beda, berdasarkan kebijakan pemerintah dalam situasi ekonomi dan sosial tertentu.

2.1.6 Penerimaan Pajak

Pemerintah mengenakan pajak terhadap warga negara atau barang sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tujuan pajak adalah untuk membayar pengeluaran pemerintah. Baik pajak perdagangan dalam negeri maupun luar negeri memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Pajak mencakup beberapa ciri, antara lain sebagai pengalihan kekayaan dari orang atau organisasi kepada pemerintah, dikenakan berdasarkan undang-undang, tidak merugikan siapa pun secara langsung, mendanai pengeluaran pemerintah, dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu pemerintah. Ada dua jenis pajak: pajak daerah yang diawasi oleh pemerintah daerah, dan pajak pusat yang diawasi oleh pemerintah pusat.

2.1.7.1 Fungsi Pajak

Resmi (2007) menyebutkan pajak mempunyai dua fungsi yakni:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara karena tujuan anggaran. Karena pajak merupakan

sumber utama penerimaan negara, maka kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup besar.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pemerintah negara bagian menggunakan pajak sebagai senjata untuk mengontrol dan menerapkan kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dikenal sebagai fungsi normal pajak. Misalnya, pendapatan dikenakan tarif pajak progresif. Sasarannya adalah pemerataan pendapatan, artinya masyarakat berpenghasilan tinggi juga akan membayar pajak yang tinggi.

2.1.7.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2013), ada tiga kategori pajak: pajak berdasarkan sifatnya, pajak berdasarkan kelas, dan pajak berdasarkan organisasi yang memungutnya. Kategori-kategori ini akan dibahas lebih rinci di bawah ini.

a. Jenis Pajak Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif

Perpajakan subyektif merupakan jenis perpajakan yang pajaknya dikenakan terlebih dahulu berdasarkan topiknya kemudian diterapkan berdasarkan keadaan wajib pajak dan keadaan objeknya. PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25 adalah beberapa contoh pajak yang termasuk dalam kategori pajak subyektif.

2) Pajak Objektif

Pajak obyektif adalah pajak yang dipungut dengan terlebih dahulu memusatkan perhatian pada objek pajaknya kemudian mencari subjeknya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Sepeda Motor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan, dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan perkotaan adalah beberapa contoh pajak yang termasuk dalam jenis pajak objektif (BPHTB).

b. Jenis Pajak Menurut Golongan

1) Pajak Langsung

Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak secara langsung disebut dengan pajak langsung. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk pajak yang termasuk dalam kategori pajak langsung.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang mempunyai potensi untuk dibebankan kepada pihak ketiga dikenal dengan pajak tidak langsung. Pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea kepemilikan kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan Pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) termasuk pajak yang termasuk dalam jenis pajak tidak langsung ini.

c. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungut

1) Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang mempunyai kewenangan untuk dipungut oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan (PBBP3) termasuk di antara pungutan yang termasuk dalam Pungutan ini. kategori pajak pusat.

3) Pajak daerah

Pemerintah daerah bertugas memungut pajak daerah baik di wilayah kabupaten/kota maupun provinsi. Dinas Pendapatan Daerah bertugas mengawasi pajak daerah dalam hal ini. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak kendaraan bermotor (PKB), dan bea balik nama kendaraan bermotor termasuk di antara retribusi yang termasuk dalam pajak daerah provinsi. Kemudian, di antara pajak daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut: Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.7.3 Pengaruh penerimaan pajak terhadap konsumsi masyarakat

Jumlah uang yang tersedia bagi masyarakat untuk dikonsumsi dapat dipengaruhi oleh kebijakan pajak. Jika pajaknya rendah, masyarakat mungkin memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, yang bisa meningkatkan konsumsi. Pajak langsung pada konsumsi tertentu juga bisa mempengaruhi pola konsumsi. Jika ada pajak tinggi pada barang-barang tertentu, hal ini bisa mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang-barang tersebut.

2.2 Kajian Empiris

Teori *Ricardian Equivalence Hypothesis* menjadi pro kontra oleh berbagai peneliti karena bertentangan dengan teori *Keynesian*. *Keynesians* berpendapat kebijakan fiskal untuk membiayai lebih banyak pengeluaran akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Pernyataan itu kontras dengan pandangan *Ricardian Equivalence Hypothesis* menyatakan utang milik pemerintah yang dilakukan pemerintah tidak memberikan dampak terhadap perekonomian melalui variabel konsumsi (Barro, 1974). Penelitian yang mendukung berlakunya diantaranya penelitian (Mosikari & Eita, 2017) yang berjudul “*Empirical test of the Ricardian Equivalence in the Kingdom of Lesotho*” mendukung teori *Ricardian Equivalence Hypothesis* yang mengungkapkan bahwa suatu peningkatan utang pemerintah menurunkan konsumsi masyarakat per kapita di negara Lesotho, konsumen dalam perekonomian

negara Lesotho memandang ke masa yang akan datang dalam membuat keputusan pengeluaran kegiatan konsumsi mereka terkait dengan kendala anggaran pemerintah. Variabel pada studi ini yaitu konsumsi masyarakat, utang pemerintah, pengeluaran pemerintah, inflasi, pertumbuhan populasi, GDP.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Killian, 2018) berjudul “*Analisis Pengaruh Utang Pemerintah Terhadap Konsumsi Masyarakat Dalam Paradigma Ricardian Equivalence Di Indonesia (Periode 2010Q1-2017Q4)*” Menggunakan teknik analisis Error Correction Models (ECM) dengan data time series 2010Q1-2017Q4 dari Bank Indonesia, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, utang pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi, sehingga paradigma Ricardian Equivalence berlaku pada jangka pendek. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Oukhallou, 2016) yang berjudul “*Fiscal policy and the Ricardian Equivalence: Empirical evidence from Morocco*” menemukan hasil bahwa kebijakan utang pemerintah tidak berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat dalam jangka pendek, melainkan dipengaruhi faktor lain diluar kebijakan pemerintah di negara Maroko. Penelitian ini menggunakan model *Vector Autoregressive (SVAR)* dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2016. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Saraswati & Wahyudi, 2018) yang berjudul “*The Effect of Fiscal Policy on the Indonesian Household Consumption: The Application of the Ricardian Equivalence Hypothesis*” menemukan hasil bahwa penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat, penelitian ini menggunakan *model Error Correction Mechanism (ECM)* dari tahun 1990 sampai 2015.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa *Ricardian Equivalence Hypothesis* tidak berlaku pada Negara-negara yang Penelitian yang dilakukan oleh (Cassar et al., 2018) yang berjudul “*Does the Ricardian Equivalence Theorem Capture the Consumption Behavior of Maltese Households?*” Penelitian ini menggunakan model *Vector Autoregressive (SVAR)* dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2016 menemukan hasil yang selaras dengan keynes dan kontra dengan Ricardian Equivalence Hypothesis. Cassar, Davison, dan Xuereb menemukan perilaku

konsumsi masyarakat di negara Malta tidak sesuai dengan teori Ricardian Equivalence Hypothesis. Kurangnya bukti yang dihasilkan untuk mendukung hubungan kointegrasi antara konsumsi dan utang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan jangka panjang. Teori *Keynesian* lebih cocok untuk menjelaskan perilaku yang mendasari konsumsi masyarakat negara Malta dalam menanggapi perubahan tingkat utang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Kurniarahman & Anas, 2020) yang berjudul “*Empirical Study of Ricardian Equivalence Hypothesis in Indonesia: The Effect of Budget Deficit on Public Consumption in 1990-2018*” menggunakan teknik analisis Adaptive Expectation Model. Mendapatkan hasil hanya tingkat suku bunga deposito yang berpengaruh signifikan terhadap konsumsi publik, sedangkan variabel lain seperti PDB, utang pemerintah, dan defisit anggaran tidak berdampak pada konsumsi publik di Indonesia untuk periode 1990-2018.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Ofori & Pickson, 2016) yang berjudul “*Ricardian Equivalence Hypothesis in the Sub- Sahara African Countries*” di negara-negara Afrika yaitu Botswana, Gambia, Ghana, Kenya dan Nigeria pada tahun 1981-2014 yang menemukan hasil bahwa konsumsi masyarakat tetap tidak berubah terlepas dari utang pemerintah. Variabel yang digunakan pada penelitian yaitu konsumsi masyarakat, utang pemerintah, GDP perkapita, pengeluaran pemerintah, inflasi, suku bunga dan pembayaran bunga utang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Waqas & Sarwar Awan, 2011) yang berjudul “*Are Pakistani Consumers Ricardian?*” di Pakistan pada tahun 1973-2009 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, utang memiliki dampak negatif pada konsumsi swasta, validitas *Ricardian Equivalence Hypothesis* tidak berlaku di negara Pakistan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumsi swasta, penerimaan pajak, utang pemerintah, defisit anggaran pemerintah, pendapatan *disposable income*.

Penelitian lainnya yang menolak berlakunya *Ricardian Equivalence Hypothesis* yaitu penelitian oleh (Abada, 2016) yang berjudul “*Exchange Rate, Interest Rate and Ricardian Equivalence Hypothesis: Evidence from Nigeria*” Penelitian ini menggunakan model *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)* pada tahun 1981Q1

dan 2013Q4, ini menunjukkan bahwa karena keringanan pajak atau pinjaman di Nigeria, masyarakat memandang utang pemerintah sebagai kekayaan bersih dan meningkatkan konsumsi barang dan jasa.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Isah et al., 2022) yang menolak berlakunya *Ricardian Equivalence Hypothesis* yaitu penelitian oleh yang berjudul “*Review of Ricardian Equivalence in Theory and Practice: Empirical Data from Nigeria*” Penelitian ini menggunakan model Analisis regresi berganda & tinjauan literatur menyatakan bahwa Tidak ada bukti empiris yang mendukung *Hipotesis Ricardian Equivalence*. Pandangan beberapa penelitian yang menolaknya berlakunya *Ricardian Equivalence Hypothesis* yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Nosakhare, 2019) yang berjudul “*Ricardian Equivalence Hypothesis in Nigeria: An Empirical Investigation*” yang menolak adanya paradigma *Ricardian Equivalence Hypothesis* di Nigeria. Penelitian ini menggunakan model *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)* pada tahun 1981 dan 2016. variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsumsi swasta, pengeluaran pemerintah, utang, pembayaran bunga utang, inflasi, tingkat bunga, PDB per kapita dan pendapatan pajak. Karena hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh utang pemerintah terhadap konsumsi masyarakat di negara Nigeria.

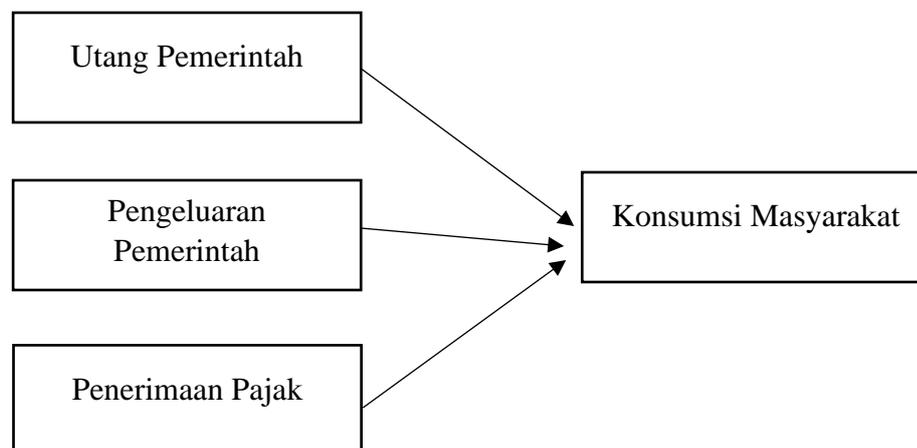
2.3 Kerangka Pemikiran

Pengaruh variabel kerangka makro dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola suatu konsumsi masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis hubungan-hubungan kerangka makro yang meliputi pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak dan utang pemerintah terhadap pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Variabel independen pertama yaitu utang pemerintah, Perspektif Ricardian mengenai utang pemerintah berpendapat bahwa keringanan pajak dan belanja konsumen tidak meningkatkan total sumber daya konsumen. Meskipun utang pemerintah meningkatkan pendapatan saat ini dalam jangka pendek, hal ini tidak mempunyai dampak jangka panjang terhadap pendapatan atau konsumsi di masa depan. Terdapat perselisihan antara penganut Keynesian mengenai dampak defisit fiskal yang dibiayai oleh utang pemerintah terhadap perekonomian. Menurut

keyakinan tersebut, peningkatan anggaran belanja melalui utang yang dikeluarkan pemerintah akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan belanja konsumen.

Pengeluaran pemerintah merupakan variabel independen kedua. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara adalah pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Belanja subsidi, yang merupakan pelengkap belanja konsumen pemerintah, merupakan sebagian besar belanja pemerintah pusat dalam APBN. Dengan kata lain, semakin banyak pengeluaran pemerintah akan merangsang lebih banyak belanja publik, sehingga akan meningkatkan konsumsi agregat suatu perekonomian.

Variabel independen yang ketiga adalah penerimaan pajak. Kebijakan pajak dapat mempengaruhi jumlah konsumsi masyarakat; misalnya, jika seseorang dikenai pajak karena membeli barang mewah, maka tingkat konsumsinya atas produksi tersebut akan menurun. Sebaliknya, jika seseorang dikenakan pajak lebih sedikit untuk pembelian barang konsumsi, maka tingkat konsumsinya akan meningkat



Sumber: Dikembangkan oleh Peneliti
Gambar 6. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji di dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga utang pemerintah berpengaruh positif terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia.
2. Diduga teori *ricardian equivalence hipotesis* tidak berlaku di Indonesia.
3. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia.
4. Diduga penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan *Vector Autoregression* (VAR) atau *Vector Error Correction Model* (VECM) untuk mengetahui korelasi antar variabel dan sejauh mana kontribusi masing-masing variabel terhadap variasi variabel lainnya. Berbeda dengan VAR dan VECM, padahal ada cara lain yang lebih mudah untuk mencari hubungan antar variabel, termasuk dengan *Ordinary Least Squares* (OLS). Melalui temuan impuls respon dan dekomposisi varians dengan menggunakan grafik dan tabel, VAR dapat dimanfaatkan untuk melihat pergerakan reaksi dan variabilitas seluruh variabel selama periode penelitian selain untuk menganalisis keterkaitan antar variabel.

3.1.1 Jenis dan Sumber Data

Time series merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Kumpulan data penelitian ini mencakup tahun 2000 hingga 2022. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 23 tahun. Setiap variabel dalam data penelitian didasarkan pada data tahunan. Tabel berikut memberikan gambaran faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Variabel, Satuan, dan Sumber

Variabel	Satuan	Sumber Data
Konsumsi Masyarakat	Milyar Rupiah	<i>World Bank</i>
Utang Pemerintah	Milyar Rupiah	Kementerian Keuangan
Pengeluaran Pemerintah	Milyar Rupiah	Kementerian Keuangan
Penerimaan Pajak	Milyar Rupiah	Kementerian Keuangan

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dan variabel pengukuran berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Dalam studi ini, “konsumsi masyarakat Indonesia” mengacu pada metrik kuantitatif yang memperhitungkan seluruh jumlah konsumsi masyarakat selama tahun studi. Data dari Word Bank digunakan untuk menyusun daftar barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat antara tahun 2000 dan 2022.
2. Total utang negara yang diungkapkan Kementerian Keuangan inilah yang dimaksud dengan utang pemerintah dalam penelitian ini. Publikasi Kementerian Keuangan memberikan informasi yang diperlukan untuk menghitung Utang Negara Indonesia pada tahun 2000 hingga 2022.
3. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pengeluaran pemerintah adalah segala belanja yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mendukung berbagai kegiatan dan program, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji pegawai, investasi dalam berbagai sektor, serta pemberian subsidi atau bantuan kepada sektor tertentu atau masyarakat. Menggunakan data tahunan pengeluaran pemerintah Indonesia tahun 2000 hingga 2022, data bersumber dari kementerian keuangan republik Indonesia.
4. Dalam penelitian ini yang dimaksud penerimaan pajak merujuk pada jumlah uang yang diterima pemerintah dari berbagai sumber pajak, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan lainnya. Penerimaan pajak memuat proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh instansi perpajakan dengan menggunakan beragam mekanisme, seperti pemotongan otomatis, pembayaran secara sukarela, atau melalui proses penagihan yang diatur berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2000 hingga 2022 data bersumber dari Publikasi Kementerian Keuangan.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipilih untuk menganalisis data dari penelitian ini adalah

Vector Autoregression (VAR) atau *Vector Error Correction Model (VECM)* yang dapat digunakan untuk melihat utang pemerintah, pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia Tahun 2000 sampai dengan 2022. Untuk memudahkan penelitian, maka peneliti menggunakan alat analisis *Eviews 10.0* untuk mengolah data dengan Model regresi linear yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen (utang pemerintah, pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak) dan variabel dependen (konsumsi masyarakat). Model regresi linear yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut: Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel : konsumsi masyarakat (CONS), utang pemerintah (U1), pengeluaran pemerintah (E2), dan penerimaan pajak (P3). Vektor variabel endogen adalah

$$\mathbf{Y}_t = [\text{const}, U1_t, E2_t, P3_t]'$$

Kemudian dilanjutkan dengan uji kointegrasi Johansen untuk memeriksa adanya hubungan kointegrasi.

Model VECM:

Jika terdapat hubungan kointegrasi, bentuk model VECM sebagai berikut:

$$\Delta \mathbf{Y}_t = \Pi \mathbf{Y}_{t-1} + \sum_{i=1}^{k-1} \Gamma_i \Delta \mathbf{Y}_{t-i} + \mathbf{u}_t$$

Di mana:

$\Delta \mathbf{Y}_t$ adalah perubahan dalam vektor variabel endogen.

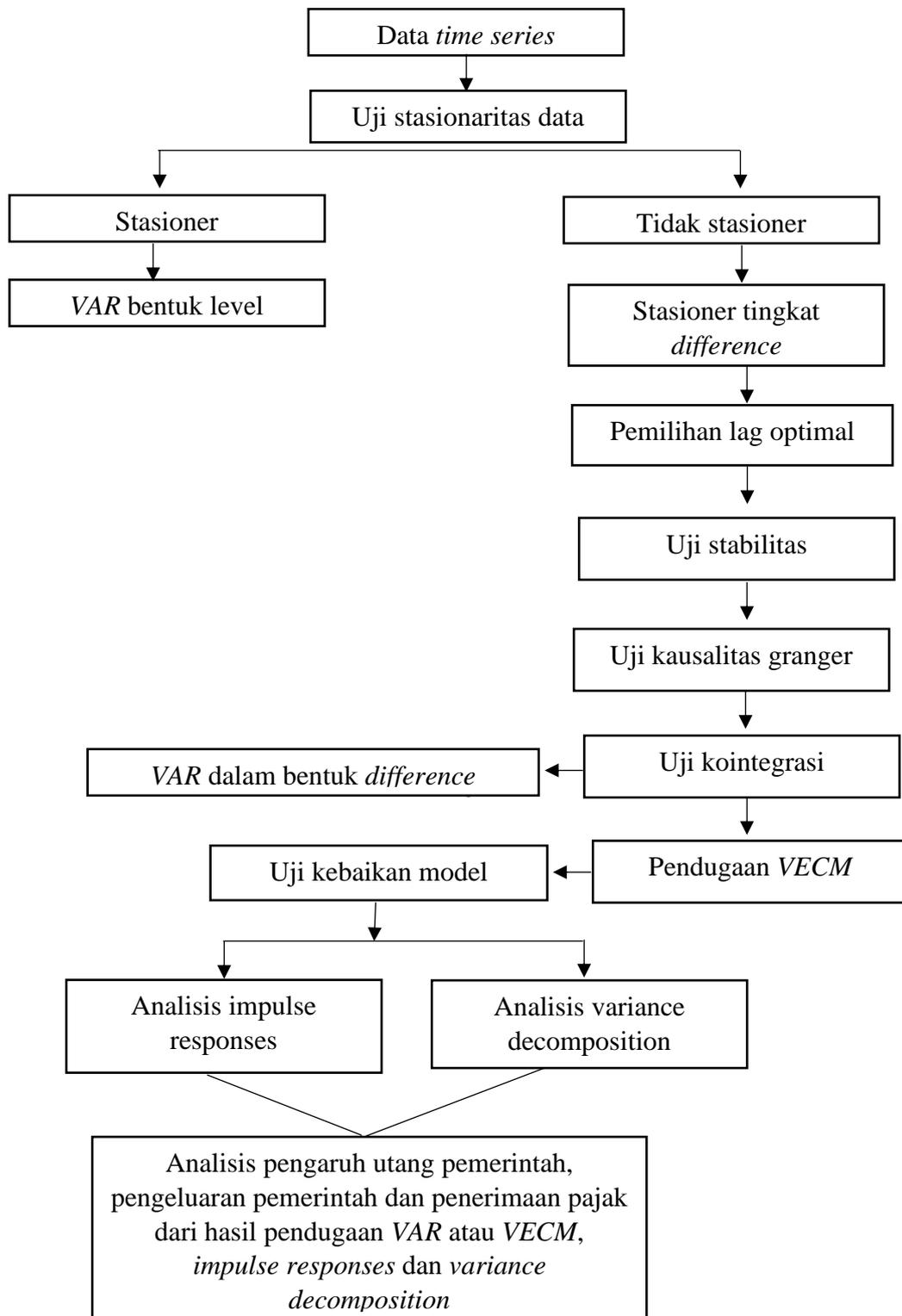
$\Pi \mathbf{Y}_{t-1}$ adalah matriks yang mengandung informasi tentang hubungan jangka panjang (kointegrasi) antar variabel.

Γ_i adalah koefisien jangka pendek.

\mathbf{u}_t adalah vektor dari istilah error (white noise).

Tahapan Analisis

Pembuatan model VAR atau VECM merupakan langkah pertama dalam proses analisis. Ini adalah rangkaian langkah yang akan mengidentifikasi model VAR atau VECM yang akan diterapkan. Kesimpulannya, Gambar 8 menggambarkan alur proses pengembangan model.



Gambar 7. Proses Pembentukan VAR atau VECM

Langkah pertama dalam membuat model VAR adalah menguji stasioneritas data.

Jika datanya stasioner, digunakan model VAR biasa (VAR tidak terbatas); jika tidak maka dilakukan uji beda dan kointegrasi. Jika data terkointegrasi maka digunakan model VAR Vector Error Correction (VEC). Namun demikian, perbedaan VAR digunakan jika data tidak terkointegrasi.

Model persamaan regresi yang menggunakan data time series adalah model VAR. Kointegrasi dan stasioneritas adalah dua masalah yang mungkin terjadi pada data deret waktu. Masalah stasioneritas data dan kointegrasi variabel-variabelnya mempunyai pengaruh langsung pada bagaimana model VAR dibangun. Pengujian stasioneritas data merupakan tahap pertama dalam pembuatan model VAR. Kami memiliki model biasa (VAR tidak terbatas) jika data stabil pada level datanya. Uji kointegrasi harus dilakukan untuk mengetahui apakah data mempunyai hubungan jangka panjang atau tidak, jika sebaliknya data stasioner selama proses diferensiasi data tetapi tidak pada levelnya. Vector Error Correction Model (VECM) adalah model yang kita miliki jika terdapat kointegrasi. Karena kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel dalam sistem VAR, maka model VECM ini merupakan model VAR yang dibatasi. Model VAR dengan data yang berbeda (VAR in Difference) dibuat ketika variabel-variabelnya tidak terkointegrasi tetapi datanya tetap stasioner selama proses diferensiasi (Widarjono, 2007, p.374).

3.3.1 Uji Stasioneritas Data

Menurut Nachrowi dan Usman (2006), suatu kumpulan data dianggap stasioner jika nilai rata-rata dan varians data deret waktu tidak berfluktuasi dengan cara yang dapat diprediksi sepanjang waktu, atau jika beberapa ahli menyatakan bahwa rata-rata dan variansnya konstan. Untuk memastikan apakah suatu data stasioner pada level 5 atau stasioner pada perbedaan sampai batas tertentu, uji stasioneritas merupakan tahap awal dalam pembuatan model VAR. Sehubungan dengan hal tersebut, Widarjono (2007) menjelaskan bahwa melakukan uji stasioneritas data merupakan tahap awal dalam pengembangan model VAR. Kami memiliki model VAR biasa (VAR tidak terbatas) jika datanya stabil pada level data.

3.3.2 Uji Kointegrasi Data

Apabila hasil uji stasioneritas data menunjukkan data tidak stasioner, maka dilakukan uji kointegrasi data. Untuk mengetahui apakah data mempunyai hubungan jangka panjang (kointegrasi) maka harus dilakukan uji kointegrasi. Kointegritas yang terjalin antar variabel itu sendiri juga menunjukkan adanya hubungan saling mempengaruhi dan menentukan model yang akan diestimasi, baik yang digunakan standar VAR maupun VAR - Vector Error Correction Model (VAR-VECM). Kita harus melakukan uji kointegritas untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu data memiliki hubungan jangka panjang jika tidak stasioner pada levelnya tetapi stasioner pada saat proses diferensiasi data. Model koreksi kesalahan vektor (VECM) adalah model yang kita miliki jika terdapat kointegrasi. Karena adanya kointegrasi yang menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel dalam sistem VAR, maka model VECM ini merupakan model VAR yang dibatasi (Widarjono, 2007).

3.3.3 Estimasi VAR atau VECM

Uji stasioneritas menghasilkan data yang stasioner, dalam hal ini model diestimasi dengan menggunakan metode standar VAR (unrestricted VAR); jika data terkointegrasi dan tidak stasioner pada level yang sama (at level level), maka modelnya adalah VECM (restricted VAR). Uji stasioner dan uji kointegrasi menentukan estimasi model dalam VAR. VAR terdiferensiasi digunakan untuk memperkirakan model jika data tidak terkointegrasi dan stasioner dalam diferensiasi. Diperlukan lag yang panjang untuk mengamati keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya guna mengestimasi model VAR. Gujarati (2003) menyatakan bahwa panjang lag yang digunakan dalam estimasi model VAR ditentukan dengan menerapkan Akaike Information Criterion (AIC) dan memilih hasil estimasi yang nilai AIC terendah. Panjang lag yang dipilih untuk model VAR adalah yang memiliki nilai Akaike Information Criterion terendah. Menurut Gujarati dan Widajono (2007), jika kita menggunakan kriteria tertentu untuk memastikan durasi lag, maka durasi lag yang ideal muncul ketika nilai kriteria tersebut memiliki nilai absolut yang paling kecil.

3.3.4 Analisis VAR atau VECM

Impulse Response Function (IRF) dan *Variance Decomposition* (VDC) suatu variabel terhadap variabel lain maupun terhadap variabel itu sendiri dapat dilihat dari hasil estimasi model VAR atau VECM. Selanjutnya dinamika model akan diperiksa dengan analisis data IRF dan VDC. Julaihah dan Insukindro (2004) menyatakan bahwa ada dua cara untuk melihat sifat dinamis model VAR: melalui *Variance Decompositions* dan *Impulse Response* (p. 332). Kedua analisis ini akan memungkinkan dilakukannya analisis reaksi masing-masing variabel terhadap guncangan variabel lain serta kontribusi masing-masing variabel terhadap pemecahan varians variabel lainnya.

3.3.5 Analisis Impulse Response

Tujuan dari analisis respon impuls adalah untuk menentukan bagaimana suatu variabel akan bereaksi terhadap guncangan atau kejutan di variabel lain. Menurut Widarjono (2007, p. 380), “Para ahli ekonometrik menggunakan analisis Impulse Response karena koefisien individu dalam model VAR sulit untuk diinterpretasikan.” Analisis Impulse Response ini memantau bagaimana guncangan atau modifikasi variabel gangguan (e) mempengaruhi variabel endogen dalam sistem VAR. Grafik atau tabel dapat digunakan untuk menggambarkan Impulse Response yang merupakan hasil estimasi VAR atau VECM. Besarnya respon variabel terhadap guncangan sebesar satu standar deviasi (S.D.) variabel-variabel dalam model dapat kita tentukan dengan memperhatikan grafik atau tabel respon impuls.

3.3.6 Analisis Variance Decomposition

Untuk mengetahui variabel mana yang relevan secara signifikan dalam mengubah baik variabel tersebut maupun variabel lainnya digunakan Analisis *Variance Decomposition*. Akibat adanya perubahan variabel tertentu dalam sistem VAR, Widarjono (2007) menyatakan bahwa analisis dekomposisi varians menggambarkan relevansi relatif setiap variabel dalam persentase kontribusi varians setiap variabel. Gambaran varians suatu variabel akibat guncangan pada

variabel itu sendiri atau variabel lain dapat diperoleh dengan menggunakan dekomposisi varians, yang dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel. Dimungkinkan untuk menentukan apakah kejutan masing-masing variabel memainkan peran penting dalam membentuk varians variabel tersebut dan variabel lain dengan memeriksa faktor-faktor eksogen (penjelas). Dengan kata lain, analisis *Variance Decomposition* membantu mengidentifikasi variabel mana yang paling mengejutkan ketika suatu variabel diubah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Disajikan temuan studi yang dilakukan mengenai dampak utang pemerintah terhadap konsumsi di Indonesia antara tahun 2000 dan 2022 dari sudut pandang *Ricardian Equivalence Hypothesis*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penerimaan pajak, konsumsi masyarakat, dan utang pemerintah. Berdasarkan wacana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu yang panjang, terdapat korelasi yang patut diperhatikan antara penerimaan pajak konsumsi masyarakat Indonesia, belanja pemerintah, dan utang pemerintah. Di sisi lain, hanya belanja pemerintah yang memberikan dampak positif terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia; utang pemerintah dan penerimaan pajak mempunyai dampak negatif.
2. Utang dan belanja pemerintah memiliki korelasi jangka pendek yang kuat dan keduanya berdampak positif terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia; penerimaan pajak, sebaliknya, memiliki korelasi positif yang cukup besar.
3. *Impuls Response Function* menunjukkan bahwa faktor pengeluaran pemerintah pusat dan utang pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi masyarakat Indonesia. Sebaliknya variabel penerimaan pajak tidak banyak berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia.
4. Mayoritas faktor independen dalam penelitian ini mempunyai dampak besar terhadap pergeseran konsumsi masyarakat Indonesia. Temuan penelitian ini

tidak mendukung *Ricardian Equivalence Hypothesis* (REH) yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal berdampak netral terhadap konsumsi masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2000 hingga 2022 dikecualikan dari REH. Dampak kebijakan fiskal terhadap konsumsi masyarakat merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Keynes, dan perekonomian Indonesia pada tahun 2000 hingga 2022 mendukung teori ini.

5. *Variance decomposition* memperlihatkan dimana variabel utang pemerintah pengaruhnya kuat terhadap konsumsi masyarakat. Hal ini memiliki arti bahwa perekonomian Indonesia pada periode 2000 hingga 2022 menolak *Ricardian Equivalence Hypothesis* dan menerima teori *Keynes* yang menyatakan utang pemerintah berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat.

5.2 Saran

1. Kebijakan fiskal ekspansif baik melalui penurunan pajak maupun peningkatan belanja pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian secara nasional.
2. Pemerintah diharapkan mampu untuk melakukan kebijakan yang dapat memperluas ruang fiskal untuk kebutuhan belanja modal, dengan itu mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik.
3. Karena pengeluaran pemerintah ada dampak positifnya yang signifikan pada konsumsi masyarakat, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan yang memperkuat pengeluaran ini untuk mendukung konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
4. Pemerintah perlu meningkatkan sumber penerimaan dan tidak hanya mengandalkan penerimaan dari pajak, Salah satunya dengan melakukan utang. Namun, sebaiknya pemerintah tetap harus mengontrol utang pemerintah dengan baik, karena di jangka panjang utang pemerintah mempunyai dampak yang negatif pengaruhnya pada konsumsi masyarakat di Indonesia.
5. Pada jangka panjang, perlu diperhatikan bahwa kebijakan fiskal harus dirancang dengan mempertimbangkan efeknya pada konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang lebih mendalam terhadap utang,

pengeluaran, dan penerimaan pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Diharapkan peneliti selanjutnya mampu menganalisis secara lebih mendalam mengenai pengaruh variabel-variabel kebijakan fiskal terhadap konsumsi masyarakat baik jangka panjang maupun jangka pendek. Karena temuan studi ini memberikan informasi bahwa *Ricardian Equivalence Hypothesis* tidak berlaku dalam konteks ekonomi Indonesia Tahun 2000-2022, perlu adanya penelitian lebih lanjut yang menggali efek kebijakan fiskal terhadap perilaku konsumsi masyarakat dengan fokus pada faktor-faktor yang lebih spesifik

DAFTAR PUSTAKA

- Abada, C. F. (2016). Exchange Rate, Interest Rate and Ricardian Equivalence Hypothesis: Evidence from Nigeria. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(5), 58–66. <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n5p58>
- Arjuna. (2021). *Pengaruh Pajak Terhadap Konsumsi Masyarakat*. Indopolitika.Com. <https://indopolitika.com/pengaruh-pajak-terhadap-konsumsi-masyarakat/>
- Atmadja, A. S. (2004). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Perkembangan Dan Dampaknya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 83–94. <http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15669>
- Ayunasta, P., Setiaji, B., & Hakim, L. (2020). Debt and Consumption in Indonesia : Ricardian Equivalence Approach. *Issues on Inclusive Growth in Developing Countries*, 1(01), 49–60.
- Ayyubi, M. S. Al, & Saputra, P. M. A. (2021). Indonesian government's primary balance and debt. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 133–152. <https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3770>
- Barro, R. J. (1974). Are government bonds net wealth? *Journal of Political Economy*, 82(6), 1095–1117. <https://doi.org/10.1086/260266>
- Cassar, I. P., Davison, K., & Xuereb, C. (2018). Does the Ricardian Equivalence Theorem Capture the Consumption Behavior of Maltese Households? *International Journal of Economics and Finance*, 10(12), 77. <https://doi.org/10.5539/ijef.v10n12p77>
- Grace Ofori-Abebrese & Robert Becker Pickson. (2016). *Ricardian Equivalence Hypothesis in the Sub-Sahara African Countries*. 33(3), 1–23.
- Hakim, L. (2006). *PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PARADIGMA RICARDIAN EQUIVALENCE 1990-2004: PENERAPAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSION (VAR)*. 282.
- Isah, A., Joseph, T., & DAIRO, R. (2022). Review of Ricardian Equivalence in Theory and Practice: Empirical Data from Nigeria. *Applied Journal of*

Economics, Management and Social Sciences, 3(1), 25–32.
<https://doi.org/10.53790/ajmss.v3i1.24>

- Killian, R. S. K. (2018). *Analisis Pengaruh Utang Pemerintah Terhadap Konsumsi Masyarakat Dalam Paradigma Ricardian Equivalence Di Indonesia (Periode 2010Q1-2017Q4)*.
- Kormendi, R. C. (1983). American Economic Association Government Debt, Government Spending, and Private. *Source: The American Economic Review*, 73(5), 994–1010.
- Kurniarahman, A., & Anas, M. (2020). Empirical Study of *Ricardian Equivalence Hypothesis* in Indonesia: The Effect of Budget Deficit on Public Consumption in 1990-2018. *Journal of Business and Political Economy : Biannual Review of The Indonesian Economy*, 2(2), 131–136. <https://doi.org/10.46851/41>
- Leiderman, L., & Blejer, M. I. (n.d.). *Modeling and Testing Ricardian Equivalence* © International Monetary Fund . *Not for Redistribution* © International Monetary Fund . *Not for Redistribution*. 1–35.
- Mankiw, N. G. (2009). Macroeconomist as a scientist and engineer. *Voprosy Ekonomiki*, 2009(5), 86–103. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-5-86-103>
- Meissner, T., & Rostam-Afschar, D. (2017). Learning Ricardian Equivalence. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 82, 273–288. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2017.07.004>
- Mosikari, T. J., & Eita, J. H. (2017). Empirical test of the Ricardian Equivalence in the Kingdom of Lesotho. *Cogent Economics and Finance*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/23322039.2017.1351674>
- Nosakhare, N. (2019). *Ricardian Equivalence Hypothesis in Nigeria : An Empirical Investigation*. October.
- Oukhallou, M. M. & Y. (2016). Fiscal policy and the Ricardian equivalence: Empirical evidence from Morocco. *Journal of Economics Library*, 3(1), 100–110.
- Prasetya, Y. A. J. I., Judul, H., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Surakarta, U. M. (2022). *Analisis Ricardian Equivalence Hypothesis*.
- Saraswati, B. D., & Wahyudi, S. T. (2018). The Effect of Fiscal Policy on the Indonesian Household Consumption: The Application of the Ricardian Equivalence Hypothesis. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(4), 90–98. <https://search.proquest.com/docview/2041568589?accountid=17242>

Shitny Dwi Istiasih, M. (2022). *Ieff* 01.03.2022. 1(3), 275–286.

Tharindu, A., & Silva, M. (n.d.). *Fakultas Bisnis , Ekonomi dan Hukum Fakultas Ekonomi Kasus Sri Lanka Oleh Pengakuan.*

Waqas, M., & Sarwar Awan, M. (2011). Are Pakistani consumer Ricardian? *Economic and Business Review*, 13(3). <https://doi.org/10.15458/2335-4216.1238>